

Key Message

- Segera lakukan *price-in* turbulensi geopolitik berbasis kepastian kebijakan domestik sebagai jangkar. Sinkronkan kebijakan industri, fiskal, dan moneter; kunci arah 10 sampai 15 tahun, bangun *early warning* geoekonomi, dan perkuat kapasitas pangan, energi, manufaktur, serta SDM tanpa melemahkan daya saing ekspor.
- Tidak perlu memilih blok. Perkuat sentralitas ASEAN dan diplomasi ekonomi yang pro bisnis, sementara dunia usaha memperluas diversifikasi pasar, mitra, dan rantai pasok serta mempercepat efisiensi, adopsi teknologi, dan produktivitas berbasis kelayakan ekonomi.

Focus Group Discussion : Memperkuat Independensi Indonesia dan Kepastian Usaha di Tengah Pergolakan Geopolitik Global

Executive Summary

Dalam rangka memperkuat koordinasi dan menghimpun pandangan strategis para pemangku kepentingan terkait dampak dinamika geopolitik global pada dunia usaha dan perekonomian domestik, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyelenggarakan *Focus Group Discussion* pada tanggal 3 Februari 2026 di kantor ISEI, Jakarta. Diskusi dihadiri (jumlah) orang dari unsur perwakilan pemerintah, dunia usaha, akademisi, pendamping masyarakat, dan praktisi lembaga keuangan. Diskusi dibuka oleh Sekretaris Umum ISEI Bapak Dr. Solikin M Juhro, serta dipandu oleh Ibu Dinna Prapto Raharja, PhD dan Bapak Mohamad Dian Revindo, PhD dari Bidang III FG Perdagangan dan Keuangan Internasional.

Gambar 1. Kerangka Pesan Utama



Sumber : Office of Chief Economist PP ISEI

Diskusi menegaskan bahwa ketegangan geopolitik—terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok—tidak lagi sekadar menciptakan volatilitas melainkan turbulensi yang tidak hanya mengganggu sektor perdagangan, tetapi juga sektor keuangan dan dunia usaha di sektor riil dalam negeri. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang bersifat struktural dan perlu diperlakukan sebagai risiko yang harus diperhitungkan (*priced-in*), bukan dihindari.

Bagi Indonesia, dampak langsung terlihat pada meningkatnya volatilitas perdagangan, investasi, biaya logistik, pembiayaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan bisnis yang menggunakan komponen impor, tekanan terhadap industri manufaktur padat karya, serta risiko pelemahan daya beli kelas menengah. Dalam jangka menengah, risiko yang lebih krusial bersifat tidak langsung,

Dr. M. Dian Revindo

Dr. Dinna Prapto Raharja

Firman Sihol Parningotan, M.Ec.

Jonathan Ersten Herawan, M.E., CFAP, CJDS.

antara lain deindustrialisasi dini, melemahnya kualitas lapangan kerja, penyusutan kelas menengah, dan meningkatnya tekanan fiskal akibat basis pajak yang rapuh. Tantangan utama bukan semata-mata berasal dari eksternal, melainkan dari ketidakpastian kebijakan domestik dan lemahnya konsistensi implementasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Diskusi menegaskan bahwa Indonesia sebaiknya meninjau kebijakan industrial, fiskal dan moneter yang tidak sinkron untuk penguatan dunia usaha dan ekspor. Belanja pemerintah yang peran dominan BUMN yang menggerus insentif dan dukungan bagi sektor swasta berisiko melemahkan pertumbuhan ekonomi dari dalam. Dari sisi hubungan kerja sama luar negeri, Indonesia tidak perlu dan tidak seharusnya memilih antara Amerika Serikat atau Tiongkok. Strategi optimal adalah mempertahankan fleksibilitas hubungan eksternal, memperluas diversifikasi mitra dan pasar, serta memperkuat sentralitas ASEAN sebagai jangkar stabilitas kawasan. Kerja sama dengan Tiongkok perlu diarahkan pada industrial upgrading, alih teknologi, dan penguatan kapasitas nasional, sementara hubungan dengan Amerika Serikat dan mitra lain dikelola secara pragmatis berbasis kepentingan ekonomi dan mitigasi risiko perdagangan.

Bagi otoritas moneter, fiskal, perencanaan pembangunan, dan diplomasi, pesan kunci *policy brief* ini adalah pentingnya mengunci arah kebijakan jangka menengah–panjang untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha, memperkuat sektor riil dengan *multiplier effect* tinggi (misalnya sektor manufaktur, pertanian, perumahan), serta mengintegrasikan kepentingan bisnis ke dalam diplomasi ekonomi. Tahun 2026 dipandang sebagai momentum potensial untuk pemulihan dan “*take-off*” ekonomi, asalkan pemerintah bersedia mengorbankan ruang fiskal jangka pendek demi stabilitas, kepercayaan, dan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Rekomendasi Way Forward

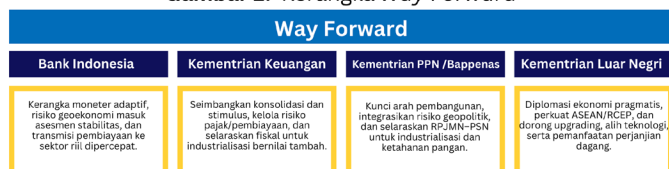
1. Bank Indonesia (BI)

- Memperkuat kerangka kebijakan moneter yang responsif terhadap volatilitas global tanpa mengorbankan stabilitas nilai tukar dan kredibilitas inflasi.
- Mengintegrasikan risiko geopolitik dan geoekonomi (tarif, sanksi, fragmentasi perdagangan) dalam asesmen stabilitas makro dan sistem keuangan.
- Mendorong transmisi kebijakan moneter yang lebih efektif ke sektor riil, khususnya pembiayaan manufaktur, pertanian, dan perumahan yang memiliki *multiplier effect* tinggi.
- Memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas pasar SBN dan arus modal jangka menengah.

2. Kementerian Keuangan

- Menjaga keseimbangan antara konsolidasi fiskal dan kebutuhan stimulus ekonomi di tengah pelemahan daya beli dan tekanan global.
- Mengelola risiko fiskal jangka menengah akibat volatilitas penerimaan pajak dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan.
- Menyelaraskan instrumen fiskal (insentif, pajak, belanja negara) dengan agenda industrialisasi, hilirisasi bernilai tambah, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
- Memastikan kebijakan fiskal tidak memperbesar ketidakpastian usaha melalui perubahan regulasi yang mendadak atau tidak terkoordinasi

Gambar 2. Kerangka Way Forward



Sumber : Office of Chief Economist PP ISEI

3. Kementerian PPN/Bappenas

- Mengunci arah pembangunan jangka menengah–panjang dengan fokus pada penguatan sektor riil dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang akan tercermin dalam penciptaan kesempatan kerja.
- Mengintegrasikan risiko geopolitik dan fragmentasi geoekonomi dalam perencanaan pembangunan nasional dan sektoral.
- Memastikan konsistensi antara RPJMN, proyek strategis nasional, dan kebijakan sektoral agar memberikan sinyal kepastian bagi dunia usaha.
- Memperkuat perencanaan industrialisasi berbasis *mix industry* (padat karya dan berteknologi tinggi) untuk mendukung transisi kelas menengah.
- Karena pasar sektor pangan bersifat residual market, maka Indonesia wajib mengembangkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

4. Kementerian Luar Negeri

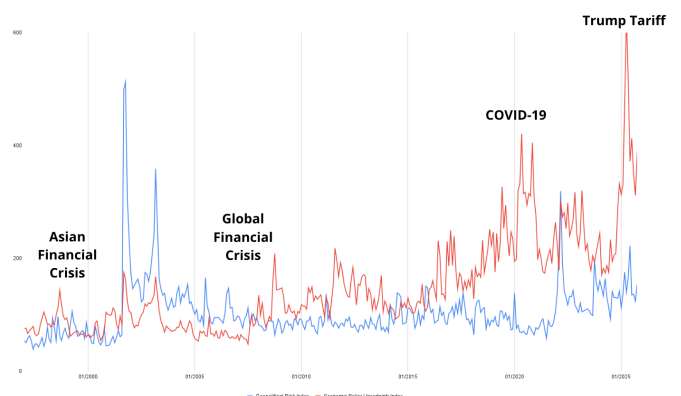
- Memperkuat diplomasi ekonomi yang pragmatis dan fleksibel, sejalan dengan prinsip bebas aktif dan kepentingan nasional.
- Mengintegrasikan kepentingan dunia usaha dalam perundingan dan forum internasional (ASEAN, G20, APEC, OECD).
- Mengoptimalkan sentralitas ASEAN dan RCEP sebagai jangkar stabilitas kawasan di tengah rivalitas kekuatan besar.
- Mengarahkan kerja sama bilateral dan multilateral pada industrial upgrading, alih teknologi, dan penguatan kapasitas nasional.
- Patut diupayakan perjanjian bilateral (i.e. penandatanganan CEPA) Indonesia dengan AS.
- Fokus pada peningkatan utilisasi 23 perjanjian perdagangan yang telah dimiliki Indonesia

Dampak langsung dari perkembangan geopolitik masa kini (per sektor)

1. Perdagangan & Industri

- Terjadi fragmentasi geoekonomi dan reorientasi rantai pasok global (*friend-shoring, regional blocs*).
- Hambatan perdagangan meningkat melalui tarif dan non-tariff measures (standar lingkungan, keamanan, *traceability*).
- Sektor manufaktur padat karya tertekan akibat tarif AS, ketidakpastian pasar, dan melemahnya permintaan global.
- Ekspor Indonesia rentan karena konsentrasi pasar dan dominasi komoditas primer.

Grafik 1. Risiko & Ketidakpastian Global



Sumber : CEIC (2025), diolah oleh Office of Chief Economist PP ISEI

2. Energi & SDA

- Volatilitas harga energi dan mineral kritis meningkat.
- Persaingan global atas *critical minerals* (nikel, lithium, *rare earth*)

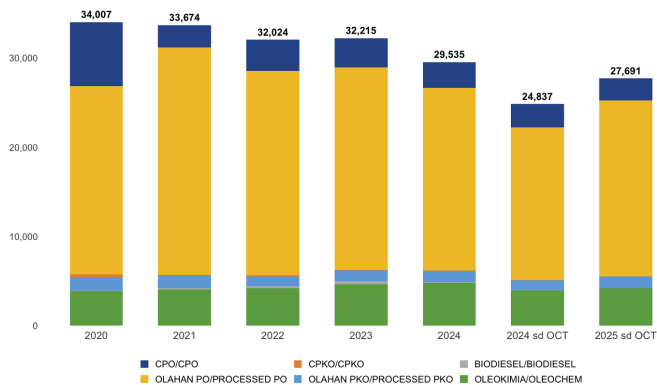
makin tajam dan sarat kepentingan geopolitik.

- Kebijakan domestik (*domestic market obligation*/DMO, bea keluar/BK, pungutan ekspor/PE) menambah tekanan daya saing ekspor.

3. Pertanian & Pangan

- Ketahanan pangan menjadi isu strategis karena negara eksportir cenderung menahan pasokan saat krisis.
- Biaya input meningkat dan produktivitas petani menurun, memperbesar kerentanan domestik.

Grafik 2. Ekspor Produk Minyak Sawit (ton)

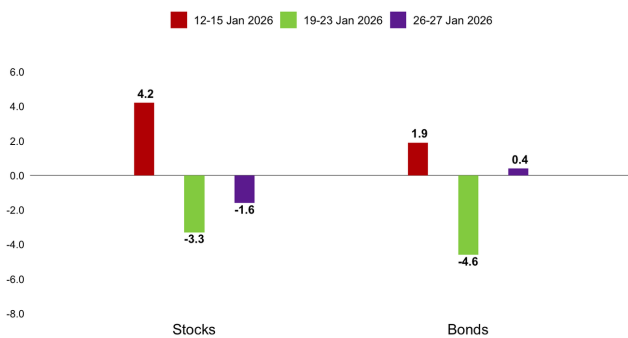


Sumber : GAPKI (2026), diolah oleh Office of Chief Economist PP ISEI

4. Keuangan & Investasi

- Ketidakpastian global meningkatkan volatilitas pasar keuangan, kurs, dan arus modal.
- Investor cenderung menahan investasi jangka panjang dan memilih instrumen jangka pendek.

Grafik 3. Aliran Dana Investor Asing (%)

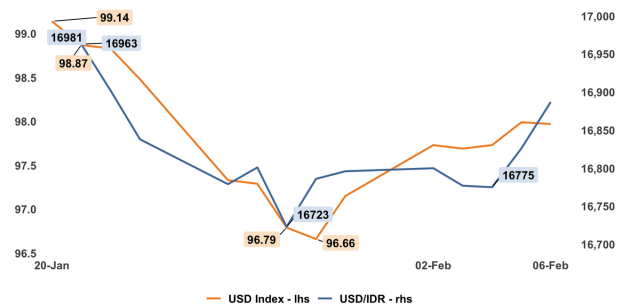


Sumber : Mandiri (2026), diolah oleh Office of Chief Economist PP ISEI

Dampak langsung yang perlu diantisipasi Indonesia

- Tekanan terhadap ekspor padat karya dan risiko PHK. Sektor yang bisa merekrut tenaga kerja justru tidak tumbuh, misalnya sektor pertanian dan manufaktur.
- Volatilitas nilai tukar, biaya logistik, dan biaya lindung nilai (*hedging*). FDI mengalami kontraksi.
- Melemahnya daya beli kelas menengah dan konsumsi domestik. Tabungan melambat pada kelas menengah dan menurun untuk kelas bawah.
- Ketidakpastian usaha akibat tumpang tindih kebijakan, baik domestik maupun global. Informan juga mengingatkan terjadinya pembiayaan untuk program-program pemerintah yang membesar sementara sektor swasta kehilangan dukungan (*crowding out*).

Grafik 4. USD/IDR

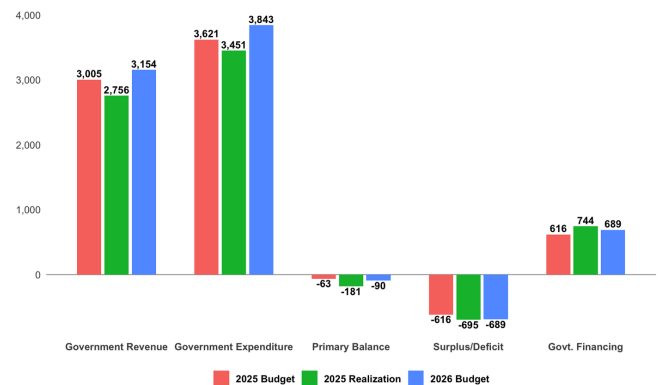


Sumber : Bloomberg (2026), diolah oleh Office of Chief Economist PP ISEI

Dampak tidak langsung yang perlu diantisipasi Indonesia

- Pelemahan kualitas pertumbuhan ekonomi akibat dominasi pekerjaan berproduktivitas rendah dan sektor informal.
- Penyusutan kelas menengah dan meningkatnya tekanan sosial.
- De-industrialisasi dini jika manufaktur tidak diperkuat.
- Meningkatnya *grey economy* akibat ketidakpastian regulasi dan lambatnya perizinan.

Grafik 5. Postur Fiskal: APBN 2025–2026



Sumber : Kemenkeu (2025), diolah oleh Office of Chief Economist PP ISEI

Risiko fiskal jangka menengah akibat melemahnya basis pajak dan tingginya kebutuhan pembiayaan. Pendapatan negara mengalami shortfall tahun lalu sebesar 271 triliun rupiah dan ditargetkan naik 400 triliun untuk bisa menutupi defisit tahun 2026, sementara kondisi harga komoditas yang turun dan ketiadaan insentif pajak justru berpotensi memperbesar shortfall pada 2026.

Grafik 6. Pertumbuhan YoY Postur APBN 2026

Government Revenue	14.4
Tax and Excise Duties Revenue	21.5
I. Tax Revenue	23.0
II. Excises Duties	11.9
Non Tax Revenue	-14.1
Grant	-76.7
Government Expenditure	11.3
Central Govt. Expenditure	21.0
I. Spending K/L	0.7
II. Spending Non-K/L	48.7
Regional Transfer and Village Funds	-18.4
Primary Balance	-50.2
Surplus/Deficit	-0.9
% to GDP	-8.2
Govt. Financing	-7.4

2026 % yoy
Sumber : Kemenkeu (2025), diolah oleh Office of Chief Economist PP ISEI

Preferensi sikap Indonesia terhadap China dan negara mitra lain termasuk ASEAN

- Indonesia tidak memilih antara AS atau Tiongkok; strategi utama adalah diversifikasi dan fleksibilitas.
- ASEAN diposisikan sebagai satu kesatuan kawasan (ASEAN *centrality*), bukan pendekatan bilateral semata.
- Optimalisasi RCEP sebagai kerangka kerja sama berbasis aturan.
- Dengan Tiongkok: fokus pada industrial *upgrading*, alih teknologi, dan penguatan kapasitas nasional—bukan sekadar perdagangan komoditas.
- Dengan AS dan mitra lain: pendekatan pragmatis berbasis kepentingan ekonomi, negosiasi tarif, dan pengurangan hambatan non-tarif yang merugikan.

Saran mitigasi atas ketidakpastian akibat ketegangan AS–China dan navigasi kepentingan dunia usaha

1. Strategi Negara

- Memperkuat kapasitas domestik: pangan, energi, industri manufaktur, dan SDM. Negara disarankan untuk melindungi petani agar memiliki nilai tukar yang memungkinkan untuk melanjutkan dan meningkatkan usahanya, mengungkit daya saing sektor manufaktur, mengembangkan insentif finansial bagi sektor riil khususnya yang padat karya.
- Mengunci arah kebijakan industri, perdagangan, dan investasi untuk horizon 10–15 tahun. Pemerintah disarankan untuk menghindari pengambilan keputusan yang tergesa-gesa karena berdampak pada iklim usaha, terutama industri yang memiliki orientasi jangka panjang.
- Mengembangkan *early warning system* geoekonomi (tarif, sanksi, logistik, NTMs) yang dapat menjadi sumber informasi bersama lintas lembaga. Kebijakan industrial, moneter dan fiskal di dalam negeri perlu mengutamakan penguatan dunia usaha di Indonesia agar mampu bertahan di tengah turbulensi global.
- Menyatukan diplomasi ekonomi dan kepentingan dunia usaha dalam forum global (G20, APEC).
- Sektor andalan ekspor, seperti sektor sawit, dipertahankan daya saing dan stabilitas harganya, misalnya dengan cara tidak membebani dengan pajak dan pungutan yang memberatkan.

2. Strategi Dunia Usaha

- Diversifikasi pasar, mitra, dan *supply chain*.
- Menghindari ketergantungan pada satu blok geopolitik.
- Fokus pada efisiensi, teknologi, dan peningkatan produktivitas.
- Mengambil keputusan bisnis berbasis kepastian dan kelayakan ekonomi (“*money carries no flag*”).

3. Inti Navigasi

Ketegangan AS–China harus diperlakukan sebagai risiko yang di *price-in*, bukan alasan menunda seluruh aktivitas. Kunci keberhasilan Indonesia bukan pada memilih blok, melainkan pada kepastian kebijakan domestik, kekuatan sektor riil, dan konsistensi reformasi.

Acknowledgement

- Kantor Staff Presiden RI
- World Bank
- Bank UOB
- Kantor Ekonom BCA
- Office of Chief Economist Mandiri
- Kadin Indonesia
- APINDO
- GAPKI
- REI
- PERBANAS
- Universitas Indonesia
- IPB University
- Perbanas Institute
- Synergy Policies
- Puskestan



**Ikatan
Sarjana Ekonomi
Indonesia**

Gedung Kantor Pusat ISEI

Jl. Daksa IV No. 9, Jakarta 12110

Telp : (021) 2277 2577

Fax : (021) 720 1812

E-mail : isei.pusat@gmail.com

[ppisei_official](#)

[PP ISEI](#)

isei.or.id